

PENDIDIKAN ISLAM DAN GENDER

Mad Sa'i¹

Abstrak: Bias gender dalam pendidikan masih kerap terjadi. Padahal ini akan berimplikasi pada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam sejumlah aspek kehidupan. Karena itu, penting terus dilakukan upaya mengatasi bias gender dalam pendidikan, di antaranya melalui; (1) reinterprestasi ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang bias gender dilakukan secara kontinyu agar ajaran agama tidak dijadikan justifikasi yang salah; (2) pengembangan kurikulum berbasis kesetaraan, keadilan dan keseimbangan; (3) pemberdayaan kaum perempuan di sektor pendidikan informal; (4) pemberdayaan di sektor ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga terutama dalam kegiatan industri rumah tangga; (5) pendidikan politik bagi perempuan agar dilakukan secara intensif; (6) pemberdayaan di sektor keterampilan, baik keterampilan untuk kebutuhan rumah tangga maupun yang memiliki nilai jual; dan (7) sosialisasi undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga lebih intens.

Kata kunci: pendidikan, gender, bias, kesetaraan.

Pendahuluan

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan masih sering terjadi. Ketimpangan gender merupakan masalah sosial yang harus diselesaikan secara integratif-holistik dengan menganalisis berbagai faktor dan indikator penyebab yang ikut aktif melestarikannya, termasuk faktor hukum dan pendidikan yang kerap kali mendapat justifikasi agama. Kesenjangan pada bidang pendidikan telah menjadi faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap bidang lain di Indonesia. Hampir semua sektor, seperti lapangan peker-

¹Penulis adalah dosen STAI Ma'arif Sampang dan asisten Dosen di STAIN Pamekasan.

jaan, jabatan, peran di masyarakat, sampai pada masalah menyuarakan pendapat antara laki-laki dan perempuan yang menjadi faktor penyebab bias gender adalah karena faktor kesenjangan pendidikan yang belum setara, selain masalah-masalah klasik yang cenderung menjustifikasi ketidakadilan gender seperti interpretasi teks-teks keagamaan yang tekstual dan kendala sosial budaya lainnya.

Perlu ditegaskan kembali perbedaan antara seks dan gender. Gender didefinisikan sebagai perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara laki-laki dan perempuan, bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi atas dasar relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Pengarusutamaan adalah upaya/strategi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen atau *stakeholders* agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan. Pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisasi, *stereotype*, subordinasi, kekerasan dan beban ganda). Pada tataran dunia, pemerintah Indonesia telah meratifikasi kesepakatan global PBB pada *Convention on the Elimination of All form of Discrimination againts Women*, sehingga pemerintah berkewajiban menghapus diskriminasi dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender baik yang bersifat sementara maupun berkesinambungan.

Bagi suatu negara, pendidikan merupakan realisasi kebijakan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan yang dicita-citakan. Pendidikan merupakan komponen pokok dalam pembinaan landasan pengembangan sosial budaya. Pendidikan juga sekaligus penegak kemanusiaan yang berperadaban tinggi. Pendidikan tidak bisa lepas dari kehidupan sosial. Artinya, pendidikan untuk kesejahteraan manusia dunia-akhirat sehingga perlu diaplikasikan,² sebab pendidikan memiliki nilai teologis dan sosiologis sekaligus.

Oleh karena itu, proses belajar mengajar merupakan kebutuhan penting hidup manusia. Hal ini harus dirasakan bersama oleh setiap individu, baik laki-laki dan perempuan, tanpa pandang bulu, karena sama-sama memiliki kemampuan untuk belajar. Semakin lama, setiap aspek kehidupan manusia berkembang, kebutuhannya pun kian beragam. Oleh

² QS. Al-Qashash: 77.

karena itu, laki-laki dan perempuan harus saling membantu, bekerja sama meniti jalan dan mengatasi masalah kehidupan yang mereka hadapi.

Dalam dekade terakhir ini, upaya penyadaran gender menjadi perbincangan serius di kalangan aktivis perempuan, keluarga-keluarga, wartawan, dunia pendidikan maupun kalangan politisi. Begitupun strategi-strategi telah ditawarkan dengan tujuan agar kesetaraan gender tercapai terutama dalam pendidikan yang dianggap dimensi kunci. Maka, dalam tulisan ini akan mencoba memberikan sedikit penjelasan mengenai gender dalam kaitannya dengan pendidikan.

Deskripsi Gender

Sebelum lebih jauh membahas mengenai relasi gender dengan pendidikan, maka terlebih dahulu perlu diketahui perbedaan antara seks dan gender. Hal ini dikhawatirkan terjadi kerancuan dalam memahami keduanya. Kesalahan dalam memahami makna gender merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sikap menentang atau sulit bisa menerima analisis gender dalam memecahkan masalah ketidakadilan sosial. Seks adalah perbedaan laki-laki dan perempuan berdasar atas anatomi biologis dan merupakan kodrat Tuhan.³ Menurut Mansour Faqih, seks berarti jenis kelamin yang merupakan penyifatan atau pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Perbedaan anatomi biologis ini tidak dapat diubah dan bersifat menetap, kodrat dan tidak dapat ditukar. Oleh karena itu, perbedaan tersebut berlaku sepanjang zaman dan di mana saja.⁴

³Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 1. Perbedaan laki-laki dengan perempuan berdasarkan seks tidak dapat disangkal lagi bahwa semua manusia akan memahaminya akan tetapi jika berdasarkan konsep gender, tidak semua dapat memahami terutama bagi kalangan yang sengaja ingin mendiskriminasi kelompok perempuan dengan menjadikan teks atau yang lain menjadi landasannya.

⁴Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 8. Fakih juga menambahkan bahwa secara biologis alat-alat kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan, hal ini merupakan kodrat dan ketentuan Tuhan.

Pendidikan Islam dan Gender

Adapun pengertian gender secara etimologis berasal dari kata *gender* yang berarti jenis kelamin.⁵ Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang. Perbedaan perilaku antara pria dan wanita, selain disebabkan oleh faktor biologis sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Oleh karena itu, gender dapat berubah dari tempat ke tempat, waktu ke waktu, bahkan antar kelas sosial ekonomi masyarakat.⁶

Dalam batas perbedaan yang paling sederhana, seks dipandang sebagai status yang melekat atau bawaan sedangkan gender sebagai status yang diterima atau diperoleh. Dengan kata lain, gender merupakan “jenis kelamin sosial” karena lahir dan dibangun dalam kehidupan sosial. Mufidah dalam *Paradigma Gender*⁷ mengungkapkan bahwa pembentukan

⁵Jhon M. Echol, dan Hasan Shadily, *Kamus Besar Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996).

⁶ Mansour Faqih, *Gender sebagai Alat Analisis Sosial*, Edisi 4 November 1996. Kerancuan dalam memahami gender ialah gender sering disalah-artikan, gender disamakan dengan perempuan atau disamakan dengan jenis kelamin. Gender itu berbeda dengan perempuan atau jenis kelamin. Jenis kelamin itu karakteristik biologis. Misalnya, Bu Ida lahir dengan jenis kelamin tertentu, dikategorikan perempuan. Bapak Amir lahir dengan jenis kelamin tertentu lainnya, dikategorikan laki-laki, itulah namanya jenis kelamin. Jenis kelamin, bersifat kodrati, karena didapat dari kelahiran; bersifat universal, karena dimanapun seseorang dengan ciri-ciri biologis tertentu itu dikategorikan perempuan atau laki-laki. Sedangkan gender adalah karakteristik sosial; yaitu menjadi perempuan dan menjadi laki-laki seperti yang digambarkan, diharapkan, diajarkan, disosialisasikan oleh keluarga, masyarakat budaya seseorang berasal atau dibesarkan. Gender menciptakan status dan peran untuk perempuan dan untuk laki atau yang dianggap patut untuk perempuan dan untuk laki-laki. Misalnya status laki-laki disuatu keluarga atau masyarakat budaya tertentu adalah kepala keluarga; perannya sebagai pencari nafkah utama; perempuan berstatus ibu rumah tangga; perannya mengurus rumah tangga. Gender juga mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan. Misalnya laki-laki sebagai pengambil keputusan untuk hal-hal tertentu/hal-hal yang dianggap penting; perempuan menjalankan keputusan atau perempuan pengambil keputusan untuk hal-hal yang sehari-hari. Lihat Yulfita Rahardjo, *Konsep Gender, Kerangka Analisa Gender Berkaitan dengan Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender/ARG*, Disampaikan dalam acara Sosialisasi Penyusunan dan Penelaahan RKAKL yang Responsif Gender pada 1 Juni 2010 di Bappenas, Ruang SS 12

⁷Mufidah Ch, *Paradigma Gender* (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 4-6.

gender ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk, kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi melalui sosial atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos seolah-olah telah menjadi kodrat laki-laki dan perempuan.

Gender merupakan analisis yang digunakan dalam menempatkan posisi setara antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat sosial yang lebih egaliter. Jadi, gender bisa dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam melakukan *measure* (pengukuran) terhadap persoalan laki-laki dan perempuan terutama yang terkait dengan pembagian peran dalam masyarakat yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri. Gender bukan hanya ditujukan kepada perempuan semata, tetapi juga kepada laki-laki. Hanya saja, yang dianggap mengalami posisi termarginalkan sekarang adalah pihak perempuan, maka perempuanlah yang lebih ditonjolkan dalam pembahasan untuk mengejar kesetaraan gender yang telah diraih oleh laki-laki beberapa tingkat dalam peran sosial, terutama di bidang pendidikan karena bidang inilah diharapkan dapat mendorong perubahan kerangka berpikir, bertindak, dan berperan dalam berbagai segmen kehidupan sosial.

Paradigma-Paradigma Pendidikan

Paling tidak ada tiga macam paradigma yang bisa mewarnai gerak langkah lembaga-lembaga pendidikan. Pertama, *paradigma konservatif*. Bagi mereka yang menganut paradigma ini mengatakan bahwa ketidaksetaraan merupakan hukum alam, dan oleh karenanya mustahil untuk dihindari, karena ia merupakan ketentuan sejarah atau bahkan takdir Tuhan. Perubahan sosial bukan sesuatu yang perlu diperjuangkan dengan serius, karena dikhawatirkan justru akan membawa manusia kepada kesengsaraan baru. Bagi penganut paradigma ini, menjadi miskin, tertindas, terpenjara adalah buah dari kesalahan mereka sendiri, karena kelalaian atau kemalasan mereka untuk belajar dan bekerja keras. Jika mereka mau, keadaan dapat berbalik bagi mereka. Kaum konservatif beranggapan bahwa harmoni dalam masyarakat merupakan hal yang penting agar konflik dapat dihindari.

Kedua, *paradigma liberal*, menganggap bahwa persoalan ekonomi dan politik tidak berkaitan langsung dengan pendidikan. Oleh karenanya usaha-usaha pemecahan persoalan pendidikan yang dilakukan pada

Pendidikan Islam dan Gender

umumnya berupa usaha-usaha reformasi yang bersifat kosmetik seperti pembangunan kelas dan fasilitas baru, memodernkan peralatan sekolah, pengadaan laboratorium atau komputer dan sebagainya yang secara umum terisolasi dari sistem dan struktur ketidakadilan kelas, gender, dominasi budaya dan represi politik yang ada dalam masyarakat. Pendidikan justru berfungsi untuk menstabilkan norma dan nilai masyarakat, menjadi media untuk mensosialisasikan dan memproduksi nilai-nilai tata susila keyakinan dan nilai-nilai dasar agar masyarakat luas berfungsi dengan baik. Paradigma ini pada umumnya berupaya membangun kesadaran naif, di mana pendidikan tidak berusaha mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada dianggap sudah baik atau *given*, dan oleh karenanya tidak perlu dipertanyakan.⁸

Sedangkan yang ketiga adalah *paradigma kritis*, yang memandang pendidikan sebagai arena perjuangan politik. Pendidikan dengan paradigma ini mengagendakan perubahan struktur secara fundamental dalam politik ekonomi masyarakat dimana ia berada. Bagi mereka, kelas dan diskriminasi gender dalam masyarakat tercermin pula dalam dunia pendidikan. Dalam perspektif ini urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap *the dominant ideology*, ke arah transformasi sosial. Tugas utama pendidik, dengan demikian adalah menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil. Paradigma kritis ini sekaligus mengadopsi kesadaran kritis dengan cara melatih anak didik untuk mampu mengidentifikasi segala bentuk ketidakadilan yang mengejawantah dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur itu bekerja, serta bagaimana mentransformasikannya.

Paulo Freire mengecam pendidikan yang selama ini dianggap sebagai sumber kebajikan telah menjadi penindas yang ulung. Pendidikan yang pada umumnya dianggap memiliki misi umum untuk mencerdaskan bangsa ternyata malah berperan aktif mengkerdikan anak didik, karena tidak mampu membuat mereka lebih humanis atau lebih manusiawi. Pendidikan yang selama ini dipercaya memiliki tugas untuk membukakan pikiran dan nurani manusia akan berbagai kesadaran palsu yang tumbuh dalam masyarakat justru turut serta menjadi pencipta kesadaran-kesa-

⁸William O'Neil, *Ideologi-Ideologi Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

darannya palsu sendiri dan menjadi pengekan kebebasan, dengan cara-cara yang terselubung. Kata Freire, "Pendidikan yang sungguh-sungguh membebaskan takkan berjarak dari kaum tertindas, takkan memperlakukan mereka sebagai orang-orang yang tak beruntung, serta menyuguhkan kaum tertindas itu model panutan dari antara kaum penindas. Pendidikan yang berawal dari kepentingan-kepentingan egoistis para penindas (egoisme yang berjubah kedermawanan palsu, yakni paternalisme), yang membuat kaum tertindas jadi objek-objek humanitarianisme, melestarikan dan memapankan penindasan. Pendidikan seperti itu adalah alat mendehumanisasi manusia."⁹

Jika kita setuju dengan Freire, tentu kita akan dengan jeli mencermati kedudukan kita sebagai pendidik, untuk mempertanyakan apakah selama ini kita telah mampu membukakan mata anak didik kita terhadap berbagai kesadaran palsu, yang biasanya berjubah kedermawanan atau kemuliaan, atau kita, mungkin tanpa kita sadari, justru telah bersetubuh dengan para penindas dan menjadi ujung tombak mereka dalam rangka melipur-lara anak didik kita agar tidak merasa bahwa mereka telah menjadi objek penindasan.

Bias Gender dalam Pendidikan

Bias gender ialah mengunggulkan salah satu jenis kelamin dalam kehidupan sosial atau kebijakan publik. Bias gender dalam pendidikan adalah realitas pendidikan yang mengunggulkan satu jenis kelamin tertentu sehingga menyebabkan ketimpangan gender.¹⁰ Berbagai bentuk kesenjangan gender yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, terpresentasi juga dalam dunia pendidikan. Bahkan proses dan institusi pendidikan dipandang berperan besar dalam mensosialisasikan dan melestrikan nilai-nilai dan cara pandang yang mendasari munculnya berbagai ketimpangan gender dalam masyarakat. Secara garis besar, fenomena kesenjangan gender dalam pendidikan dapat diklasifikasi dalam beberapa dimensi, antara lain:

1. Kurangnya partisipasi (*under-participation*). Dalam hal partisipasi pendidikan, perempuan di seluruh dunia menghadapi problem yang sama. Dibanding lawan jenisnya, partisipasi perempuan dalam pendid-

⁹Paulo Freire *et.al*, *Menggugat Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 444.

¹⁰Hanun Asrohah, *Sosiologi Pendidikan* (Surabaya: Kopertais Press, 2008), cet. 1, 178.

dikan formal jauh lebih rendah di negara-negara dunia. Ketika pendidikan dasar belum diwajibkan, jumlah murid perempuan umumnya hanya separuh atau sepertiga jumlah murid laki-laki.¹¹

2. Kurangnya keterwakilan (*under-representation*). Partisipasi perempuan dalam pendidikan sebagai tenaga pengajar maupun pimpinan juga menunjukkan kecenderungan disparitas progresif. Jumlah guru perempuan pada jenjang pendidikan dasar umumnya sama atau melebihi jumlah guru laki-laki. Namun, pada jenjang pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi, jumlah tersebut menunjukkan penurunan drastis.
3. Perlakuan yang tidak adil (*unfair treatment*). Kegiatan pembelajaran dan proses interaksi dalam kelas seringkali bersifat merugikan murid perempuan. Guru secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian yang lebih besar kepada murid laki-laki dibanding murid perempuan. Para guru kadangkala cenderung berpikir ke arah "*self fulfilling prophecy*" terhadap siswa perempuan karena menganggap perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan yang tinggi.

Menurut Philip Robinson, ketimpangan dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ketimpangan pada *akses* terhadap pendidikan dan ketimpangan pada *hasil* atau *outcome* pendidikan.¹² Akses perempuan ke sekolah lanjutan atas dan perguruan tinggi masih terbatas. Di Indonesia, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ace Suryadi, berdasarkan angka statistik kesejahteraan rakyat dari Biro Pusat Statistik pada tahun 2000/2001 penduduk perempuan yang berpendidikan SD sudah mencapai 33,4% yang bahkan sedikit lebih tinggi daripada laki-laki lulusan SD 32,5%. Perempuan yang berpendidikan SLTP 13% sedikit lebih rendah dari laki-laki yang berpendidikan sama yaitu sebesar 15%. Penduduk perempuan yang berpendidikan SMA adalah 11,4% atau lebih rendah dari laki-laki yang berpendidikan sama yaitu sebesar 15,7%. Sementara itu, penduduk perempuan berpendidikan sarjana sudah men-

¹¹Amasari (Member of PSG LAIN), *Laporan Penelitian Pendidikan Berwawasan Gender* (Banjannasin: IAIN Antasari, 2005), 31.

¹²Philip Robinson, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Press, 1981), 277.

capai 2,1% yang masih lebih rendah dari penduduk laki-laki yang berpendidikan sarjana 3,2%.¹³

Faktor yang menghambat akses perempuan terhadap pendidikan tingkat atas dan tinggi adalah jumlah sekolah yang terbatas, dan jarak tempuh yang jauh diduga lebih membatasi anak perempuan untuk bersekolah dibandingkan laki-laki. Perkawinan dini juga diduga menjadi sebab mengapa perempuan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Laporan Kementerian Pendidikan yang penyusunannya dibiayai UNICEF, juga menjelaskan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan, khususnya bagi anak perempuan yang ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah, atau mereka yang berasal dari keluarga miskin dan tinggal di pedesaan.

Selain itu juga ditemukan gejala pemisahan gender dalam jurusan atau program studi sebagai salah satu bentuk diskriminasi gender secara sukarela ke dalam bidang keahlian. Pemilihan jurusan-jurusan bagi anak perempuan lebih dikaitkan dengan fungsi domestik, sementara itu anak laki-laki diharapkan berperan dalam menopang ekonomi keluarga sehingga harus lebih banyak memilih keahlian-keahlian ilmu keras, teknologi dan industri. Penjurusan pada pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi menunjukkan masih terdapatnya stereotype dalam sistem pendidikan di Indonesia yang mengakibatkan tidak berkembangnya pola persaingan sehat menurut gender. Sebagai contoh, bidang ilmu sosial pada umumnya didominasi siswa perempuan, sementara bidang ilmu teknis umumnya didominasi siswa laki-laki. Pada tahun ajaran 2000/2001, persentase siswa perempuan yang bersekolah di SMK Program Studi Teknologi Industri baru mencapai 18,5 persen, Program Studi Pertanian dan Kehutanan 29,7 persen.

Sedangkan ketimpangan pada hasil pendidikan adalah perbedaan akhir pendidikan. Ketimpangan pada hasil pendidikan menunjukkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada prestasi pendidikan. Prestasi di antara mereka tidak sepadan. Prestasi laki-laki lebih tinggi atau lebih baik dari pada perempuan. Ketimpangan akses pendidikan dapat berdampak pada feminisasi dalam pendidikan. Ketidaksamaan kesempatan dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan akan berdampak

¹³Ace Suryadi dan EcepIdris, *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*, cet. I (Bandung: Genesindo, 2004), 19.

pada kecenderungan melihat bahwa perempuan hanya bisa diterima pada sistem pendidikan tertentu. Di masyarakat, berkembang sikap bahwa perempuan hanya cocok pada jenis pendidikan tertentu dan tidak pantas memilih sistem pendidikan lainnya.

Dengan rendahnya tingkat pendidikan penduduk yang berjenis kelamin perempuan, maka secara otomatis perempuan belum berperan secara maksimal. Pencanangan wajib belajar pada usia 6 tahun pada tahun 1984 dan program wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994, belum memberikan hasil yang signifikan terhadap perempuan. Terjadinya pengingkaran dan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan seperti yang digambarkan di atas, menurut Masdar F. Mus'udi pangkal mulanya adalah disebabkan oleh adanya pelabelan sifat-sifat tertentu pada kaum perempuan yang cenderung merendahkan. Misalnya perempuan itu lemah, lebih emosional ketimbang nalar, *cengeng*, tidak tahan banting, tidak patut hidup selain di dalam rumah tangga. Setidaknya ada empat persoalan yang menimpa perempuan akibat adanya pelabelan ini¹⁴ yaitu: *Pertama*, melalui proses subordinasi (meletakkan perempuan di bawah supremasi lelaki), perempuan harus tunduk kepada sesama manusia, yakni kaum lelaki. Pemimpin atau imam hanya pantas dipegang oleh laki-laki, perempuan hanya boleh menjadi makmum saja. *Kedua*, perempuan cenderung dimarginalkan, diletakkan di pinggir. *Ketiga*, karena kedudukannya yang lemah, perempuan sering menjadi sasaran tindak kekerasan oleh kaum laki-laki. *Keempat*, perempuan hanya menerima beban pekerjaan yang jauh lebih berat dan lebih lama daripada yang dipukul kaum laki-laki.

Secara khusus faktor penyebab bias gender dalam pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan angka partisipasi pendidikan pada tingkat SD/Ibtidaiyah sudah mencapai titik optimal yang tidak mungkin diatasi hanya dengan kebijakan pendidikan, sehingga perbedaan itu menjadi semakin sulit ditekan ke titik yang lebih rendah lagi. Kesenjangan ini lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor struktur karena fasilitas pendidikan SD sudah tersebar relatif merata. Faktor-faktor struktural itu di antaranya adalah nilai-nilai sosial budaya, dan ekonomi keluarga yang lebih meng-

¹⁴Masdar F. Mas'udi, *Perempuan dalam Wacana Keislaman* (Jakarta: Penerbit Obor, 1997), 55-57.

- anggap pendidikan untuk anak laki-laki lebih penting dibandingkan dengan perempuan. Faktor ini berlaku terutama di daerah-daerah terpencil yang jarang penduduknya serta pada keluarga-keluarga berpendidikan rendah yang mendahulukan pendidikan untuk anak laki-laki.
2. Pada tingkat SMP/MTs dan SMA/MA perbedaan angka partisipasi menurut gender lebih banyak terjadi pada daerah-daerah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan, terutama di daerah-daerah pedesaan dan luar Jawa. Faktor penyebab bias gender pada tingkat SMP ke atas relatif lebih kecil dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya dan ekonomi keluarga karena siswa dan mahasiswa yang datang dari keluarga sosial ekonomi tinggi sudah lebih besar proporsinya. Dengan demikian, pengadaan dan distribusi sumber-sumber pendidikan SMP, SMA dan Perguruan Tinggi masih menjadi faktor penting untuk mengurangi bias gender dalam pendidikan.
 3. Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pendidikan sangat rendah karena akses perempuan juga masih dirasakan rendah dalam menempati jabatan-jabatan birokrasi pemegang kebijakan. Proporsi kepada sekolah perempuan secara konsisten masih kecil dibandingkan dengan laki-laki pada setiap jenjang pendidikan. Perempuan pemegang jabatan struktural, dari tingkatan strategis sampai operasional jauh lebih rendah daripada lawan jenisnya. Oleh karena itu, banyak kebijakan pendidikan kurang sensitif gender, yang akan berdampak luas terhadap berbagai dimensi bias gender dalam bidang pendidikan.
 4. Laki-laki lebih dominan dalam mempengaruhi isi kurikulum sehingga proses pembelajaran cenderung bias laki-laki. Fenomena ini dapat diamati dari buku-buku pelajaran yang sebagian besar penulisnya adalah laki-laki. Penulis buku laki-laki sangat dominan.
 5. Isi buku pelajaran yang membahas status perempuan dalam masyarakat akan banyak memberikan pengaruh terhadap kesenjangan gender dalam proses pendidikan. Muatan dari sebagian buku pelajaran (khususnya IPS, PPKn, Pendidikan Jasmani, Bahasa dan Sastra Indonesia, Kesenian dan sejenisnya) yang berhasil diamati cenderung kurang berwawasan gender khususnya berkaitan dengan konsep keluarga atau peran perempuan dalam keluarga yang telah lama dipengaruhi oleh

Pendidikan Islam dan Gender

cara berpikir tradisional, bahwa laki-laki adalah pemegang fungsi produksi sedangkan perempuan memegang fungsi reproduksi.

6. Faktor kesenjangan antar gender dalam pendidikan jauh lebih dominan laki-laki. Khususnya dalam lembaga birokrasi di lingkungan pendidikan sebagai pemegang kekuasaan atau kebijaksanaan, maupun dalam jabatan-jabatan akademis kependidikan sebagai pemegang kendali pemikiran yang banyak mempengaruhi pendidikan. Keadaan ini akan semakin bertambah parah jika para pemikir atau pemegang kebijaksanaan pendidikan tersebut tidak memiliki sensitivitas gender.
7. Khusus pada kebijaksanaan pendidikan, khususnya menyangkut sistem seleksi dalam pendidikan. Kontrol dalam penerimaan karyawan terutama di sektor swasta sangat dirasakan bias gender. Kenyataan menunjukkan bahwa jika suami istri berada dalam salah satu perusahaan, misalnya bank, baik milik pemerintah maupun swasta, maka salah satunya memilih untuk keluar dan biasanya perempuan lah yang memilih keluar dari pekerjaan. Ini bagian dari faktor-faktor bias gender dalam pendidikan.
8. Faktor struktural yakni yang menyangkut nilai, sikap, pandangan dan perilaku masyarakat yang secara dominan mempengaruhi keputusan keluarga untuk memilih jurusan-jurusan yang lebih dianggap cocok untuk perempuan, seperti pekerjaan perawat, kesehatan, teknologi kerumahtanggaan, psikologi, guru sekolah, dan sebagainya. Hal ini terjadi karena perempuan dianggapnya memiliki fungsi-fungsi produksi. Laki-laki dianggap berperan sebagai fungsi penopang ekonomi keluarga sehingga harus lebih banyak memilih keahlian-keahlian ilmu teknologi dan industri.

Faktor lain yang turut mempengaruhi bias gender dalam pendidikan adalah munculnya persaingan dengan teknologi yang menggantikan peranan pekerja perempuan dengan mesin. Dampaknya, lagi-lagi perempuan menjadi korban teknologi khususnya perempuan yang memiliki tingkat pendidikan rendah ditambah pula dengan kemampuan ekonomi yang masih lemah.¹⁵

¹⁵Rukmina Gonibala, *Fenomena Bias Gender dalam Pendidikan Islam* (artikel STAIN Manado Juli-Desember 2007), 40-41.

Problematika Gender dan Pendidikan

Dalam deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia pasal 26 dinyatakan bahwa :” Setiap orang berhak mendapatkan pengajaran. Pengajaran harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk sekolah rendah dan tingkat dasar. Pengajaran harus mempertinggi rasa saling mengerti, saling menerima serta rasa persahabatan antar semua bangsa, golongan-golongan kebangsaan, serta harus memajukan kegiatan PBB dalam memelihara perdamaian dunia ... “. Terkait dengan deklarasi di atas, sesungguhnya ketika pendidikan bukan hanya dianggap dan dinyatakan sebagai sebuah unsur utama dalam upaya pencerdasan bangsa melainkan juga sebagai produk atau konstruksi sosial, maka dengan demikian pendidikan juga memiliki andil bagi terbentuknya relasi gender di masyarakat.

Statement di atas mengemuka karena telah terjadi banyak ketimpangan gender di masyarakat yang diasumsikan muncul karena terdapat bias gender dalam pendidikan. Di antara aspek yang menunjukkan adanya bias gender dalam pendidikan dapat dilihat pada perumusan kurikulum dan juga rendahnya kualitas pendidikan. Implementasi kurikulum pendidikan sendiri terdapat dalam buku ajar yang digunakan di sekolah-sekolah. Realitas yang ada, dalam kurikulum pendidikan (agama ataupun umum) masih terdapat banyak hal yang menonjolkan laki-laki berada pada sektor publik sementara perempuan berada pada sektor domestik. Dengan kata lain, kurikulum yang memuat bahan ajar bagi siswa belum bernuansa netral gender, baik dalam gambar ataupun ilustrasi kalimat yang dipakai dalam penjelasan materi. Rendahnya kualitas pendidikan diakibatkan oleh adanya diskriminasi gender dalam dunia pendidikan. Ada empat aspek yang disorot oleh Kementerian Pendidikan Nasional mengenai permasalahan gender dalam dunia pendidikan yaitu *akses, partisipasi, proses pembelajaran, dan penguasaan*.

Yang dimaksud dengan *aspek akses* adalah fasilitas pendidikan yang sulit dicapai. Misalnya, banyak sekolah dasar di tiap-tiap kecamatan namun untuk jenjang pendidikan selanjutnya seperti SMP dan SMA tidak banyak. Tidak setiap wilayah memiliki SMP dan seterusnya, hingga banyak siswa yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapainya. Di lingkungan masyarakat yang masih tradisional, umumnya orang tua segan mengirimkan anak perempuannya ke sekolah yang jauh karena mengkhawatirkan keamanan mereka. Oleh sebab itu banyak anak perem-

puan yang 'terpaksa' tinggal di rumah. Belum lagi beban tugas rumah tangga yang banyak dibebankan pada anak perempuan membuat mereka sulit meninggalkan rumah. Akumulasi dari faktor-faktor ini membuat anak perempuan banyak yang cepat meninggalkan bangku sekolah.

Faktor yang kedua adalah *aspek partisipasi* di mana tercakup di dalamnya faktor bidang studi dan statistik pendidikan. Dalam masyarakat kita di Indonesia, di mana terdapat sejumlah nilai budaya tradisional yang meletakkan tugas utama perempuan di arena domestik, seringkali anak perempuan agak terhambat untuk memperoleh kesempatan yang luas untuk menjalani pendidikan formal. Sudah sering dikeluhkan bahwa jika sumber-sumber pendanaan keluarga terbatas, maka yang harus didahulukan untuk sekolah adalah anak-anak laki-laki. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tugas pria kelak apabila sudah dewasa dan berumah-tangga, yaitu bahwa ia harus menjadi kepala rumah tangga dan pencari nafkah. Sampai tahun 2002, rata-rata lama sekolah anak perempuan sekitar 6,5 tahun dibandingkan anak laki-laki sekitar 7,6 tahun. Hingga tahun 2003, penduduk perempuan buta aksara usia 15 tahun ke atas mencapai 13,84 persen. Sedangkan penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang buta huruf sebesar 6,52 persen. Makin tinggi tingkat pendidikan, makin tinggi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Namun yang tak boleh dilupakan adalah, bahwa walaupun perempuan hanya bergerak di arena domestik dan tugasnya adalah mendidik anak dan menjaga kesejahteraan keluarga, ia tetap harus berilmu untuk tugas itu. *Stereotype* gender yang berkembang di masyarakat yang telah mengkotak-kotakkan peran apa yang pantas bagi perempuan dan laki-laki. Dalam pembangunan pendidikan masih terjadi gejala pemisahan gender (*gender segregation*) dalam jurusan atau program studi sebagai salah satu bentuk diskriminasi gender secara sukarela (*voluntarily discrimination*) ke dalam bidang keahlian dan selanjutnya pekerjaan yang berlainan. Hal ini disebabkan oleh nilai dan sikap yang dipengaruhi faktor-faktor sosial budaya masyarakat yang secara melembaga telah memisahkan gender ke dalam peran-peran sosial yang berlainan. Pemilihan jurusan-jurusan bagi anak perempuan lebih dikaitkan dengan fungsi domestik, sementara itu anak diharapkan berperan dalam menopang ekonomi keluarga sehingga harus lebih banyak memilih keahlian-keahlian ilmu keras, teknologi dan industri.

Sementara pada aspek ketiga yaitu *aspek proses pembelajaran* masih juga dipengaruhi oleh *stereotype* gender. Yang termasuk dalam proses pembelajaran adalah materi pendidikan, misalnya yang terdapat dalam contoh-contoh soal di mana semua kepemilikan selalu mengatas namakan laki-laki. Dalam aspek proses pembelajaran ini bias gender juga terdapat dalam buku-buku pelajaran, seperti semua jabatan formal dalam buku seperti Camat, Direktur digambarkan dijabat oleh laki-laki. Selain itu ilustrasi gambar juga bias gender, yang seolah-olah menggambarkan bahwa tugas wanita adalah sebagai ibu rumah tangga dengan tugas-tugas menjahit, memasak dan mencuci.

Aspek yang terakhir adalah *aspek penguasaan*. Kenyataan banyaknya angka buta huruf di Indonesia didominasi oleh kaum perempuan. Data BPS tahun 2003, menunjukkan dari jumlah penduduk buta aksara usia 10 tahun ke atas sebanyak 15.686.161 orang, 10.643.823 orang di antaranya atau 67,85 persen adalah perempuan¹⁶

Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

Keadilan dan kesetaraan adalah gagasan dasar, tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan membangun keluarga berkualitas. Jumlah penduduk perempuan hampir setengah dari seluruh penduduk Indonesia dan merupakan potensi yang sangat besar dalam mencapai kemajuan dan kehidupan yang lebih berkualitas. Kesetaraan gender, kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan & keamanan nasional (Hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Keadilan gender suatu perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Perbedaan biologis tidak bisa dijadikan dasar untuk terjadinya diskriminasi mengenai hak sosial, budaya, hukum dan politik terhadap satu jenis kelamin tertentu. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki

¹⁶<http://www.dikmas.depdiknas.go.id/05-p-gender-pedoman.html>

dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Dasar persamaan pendidikan mengantarkan setiap individu atau rakyat mendapatkan pendidikan sehingga bisa disebut pendidikan kerakyatan. Wardiman Djojonegoro menyatakan bahwa ciri pendidikan kerakyatan adalah perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pendidikan pada setiap jenis kelamin dan tingkat ekonomi, sosial, politik, agama dan lokasi geografis publik. Dalam kerangka ini, pendidikan diperuntukkan untuk semua, minimal sampai pendidikan dasar. Sebab, manusia memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Apabila ada sebagian anggota masyarakat, sebodoh apapun yang tersingkir dari kebijakan kependidikan berarti kebijakan tersebut telah meninggalkan sisi kemanusiaan yang setiap saat harus diperjuangkan.¹⁷

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa nilai kemanusiaan terwujud dengan adanya pemerataan yang tidak mengalami bias gender. Masalah pendidikan, antara anak perempuan dan anak laki-laki hendaknya harus seimbang. Anak perempuan, sebagaimana anak laki-laki harus punya hak/kesempatan untuk sekolah lebih tinggi. Bukan menjadi alternatif kedua jika kekurangan biaya untuk sekolah. Hal ini dengan pertimbangan adanya penghambur-hamburan uang sebab mereka akan segera bersuami, peluang kerjanya kecil dan bisa lebih banyak membantu orang tua dalam pekerjaan rumah. Pendirian seperti ini melanggar etika Islam yang memperlakukan orang dengan standar yang materialistik. Islam menyerukan adanya kemerdekaan, persamaan dan kesempatan yang sama antara yang kaya dan yang miskin dalam bidang pendidikan di samping penghapusan sistem-sistem kelas-kelas dan mewajibkan setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu serta memberikan kepada setiap muslim itu segala macam jalan untuk belajar, bila mereka memperlihatkan adanya minat dan bakat.

Dengan demikian, pendidikan kerakyatan seharusnya memberikan mata pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat setiap individu perempuan, bukan hanya diarahkan pada pendidikan agama dan ekonomi rumah tangga melainkan juga masalah pertanian dan keterampilan lain.

¹⁷Eni Purwati dan Hanun Asrohah, *Bias Gender dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Alpha, 2005), 30.

Pendidikan dan bantuan terhadap perempuan dalam semua bidang tersebut akan menjadikan nilai yang amat besar-merupakan langkah awal untuk memperjuangkan persamaan yang sesungguhnya.

Pendidikan memang harus menyentuh kebutuhan dan relevan dengan tuntutan zaman yaitu kualitas yang memiliki keimanan dan hidup dalam ketakwaan yang kokoh, mengenali, menghayati dan menerapkan akar budaya bangsa, berwawasan luas dan komprehensif, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan mutakhir, mampu mengantisipasi arah perkembangan, berpikir secara analitik, terbuka pada hal-hal yang baru, mandiri, selektif, mempunyai kepedulian sosial yang tinggi dan berusaha meningkatkan prestasi. Perempuan dalam pendidikannya juga diarahkan agar mendapatkan kualitas tersebut sesuai dengan taraf kemampuan dan minatnya.

Ungkapan Athiyah tentang pendidikan perempuan seakan menyadari kondisi riil historisitas kaum muslimin yang secara sosial perempuan seringkali dirugikan oleh perilaku sosialnya. Seperti gadis-gadis harus putus sekolah karena diskriminasi gender (sebab pernikahan atau hamil di luar nikah) atau karena keterbatasan ekonomi anak laki-laki mendapatkan prioritas utama walau potensinya tidak lebih tinggi daripada anak perempuan.

Upaya Penanggulangan Dampak Negatif dari Bias Gender dalam Pendidikan Islam

Untuk mengembalikan nilai kerakyatan dan kemanusiaan pendidikan, Athiyah berpendapat bahwa pendidikan harus dipusatkan pada ibu. Apabila perempuan terdidik dengan baik, niscaya pemerataan pendidikan telah mencapai sasaran. Sebab, ibu adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Minim sekali orang yang terlepas dari jangkauan ibunya. Ibu adalah sekolah bagi rakyat tanpa mengenal lelah, ekonomi, waktu dan dilakukan penuh kasih sayang. Padahal inti demokrasi tertinggi adalah saat keterbukaan, kerelaan dan persaudaraan telah mencapai tingkat kasih sayang. Peran ini adalah pendidikan nonformal yang biasa dilakukan perempuan di rumah.

Presiden Tanzania, Nyerere pernah mengatakan, “Jika anda mendidik seorang laki-laki, berarti anda telah mendidik seorang *person*, tetapi jika anda mendidik seorang perempuan berarti anda telah mendidik seluruh

anggota keluarga.” Kondisi tersebut tidak bisa diperoleh lewat pendidikan yang meninggalkan nilai persamaan dan kemanusiaan. Sering dipahami bahwa perempuan didominasi perasaan daripada rasio. Karenanya mereka cenderung sensitif, berbeda dengan laki-laki yang lebih rasional karena yang dominan dalam dirinya adalah rasio sehingga perempuan tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi yang melibatkan rasio tersebut. Sebenarnya, kondisi yang sering disalahtafsirkan ini dari sisi kemanusiaan malah menunjukkan sebaliknya, yaitu perempuan memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah lebih berperannya hati. Padahal, hati merupakan penentu nilai baik-buruk individu. Mereka yang dekat dengan alam, tekun dan teliti. Banyak bidang-bidang yang membutuhkan kelebihan-kelebihan tersebut.

Di samping itu, dengan hati nurani juga seseorang membongkar kemunafikan. Bila hati nurani jernih dan bersih, pasti sesuai dan sama dengan hati nurani bangsa serta rakyat secara keseluruhan. Memang, perempuan cenderung emosional dan sensitive. Karenanya, dengan hati dan kesensitivannya mereka mendapatkan firasat-firasat keibuan yang membuatnya menjadi peka dan memiliki intuisi tajam akan apa yang ada di permukaan dan kasih sayang. Hal inilah yang menjadi inti dari nilai kemanusiaan.

Pusat pendidikan pada ibu, dapat memberi kepekaan di atas sebagaimana kata Rukmini, “Ibulah yang pertama kali tekun mendidik saya untuk memahami dunia dan kehidupan ini sebagai keutuhan sistem. Beliau selalu mengajak saya bangun pada malam hari melihat bintang dan menjelaskan soal *jagad gede* dan kaitannya dengan *jagad cilik*. Dari beliau saya bisa belajar mengenai bagaimana memahami keberadaan hidup ini dengan cara pandang yang taembus ruang dan waktu.” Dengan kasih sayangnya Rukmini melakukan pembelaan terhadap siapa yang lemah dan tertindas. Kepedulian seperti itu tak akan dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki hati nurani.¹⁸

Upaya lain untuk mengatasi bias gender dalam pendidikan Islam yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Reinterpretasi ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits yang bias gender dilakukan secara kontinu agar ajaran agama tidak dijadikan justifikasi sebagai kambing hitam untuk memenuhi keinginan segelintir orang.

¹⁸Ibid., 36.

2. Muatan kurikulum nasional yang menghilangkan kesan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, demikian pula kurikulum lokal dengan berbasis kesetaraan, keadilan dan keseimbangan. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan dan tipologi daerah yang dimulai dari tingkat pendidikan TK sampai ke tingkat Perguruan Tinggi.
3. Pemberdayaan kaum perempuan di sektor pendidikan informal seperti pemberian fasilitas belajar mulai di tingkat kelurahan sampai kepada tingkat kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
4. Pemberdayaan di sektor ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga terutama dalam kegiatan industri rumah tangga. Dengan demikian akan menghilangkan ketergantungan ekonomi kepada laki-laki karena salah satu terjadinya marginalisasi pada perempuan adalah ketergantungan ekonomi keluarga kepada laki-laki.
5. Pendidikan politik bagi perempuan agar dilakukan secara intensif untuk menghilangkan melek politik bagi perempuan. Karena masih ada anggapan bahwa politik itu hanya milik laki-laki dan politik itu adalah kekerasan, padahal sebaliknya politik adalah seni untuk mencapai kekuasaan. Dengan demikian kuota 30% sesuai dengan amanah undang-undang segera terpenuhi, mengingat pemilih terbanyak adalah perempuan.
6. Pemberdayaan di sektor keterampilan, baik keterampilan untuk kebutuhan rumah tangga maupun yang memiliki nilai jual ditingkatkan, terutama kaum perempuan di pedesaan agar terjadi keseimbangan antara perempuan yang tinggal di perkotaan dengan pedesaan sama-sama memiliki keterampilan yang relatif bagus.
7. Sosialisasi Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga lebih intens dilakukan agar kaum perempuan mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan amanah dari UUK.

Penutup

Seks adalah perbedaan laki-laki dan perempuan berdasar anatomi biologis dan merupakan kodrat Tuhan. Sedangkan gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh unsur biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang. Dengan demikian

Pendidikan Islam dan Gender

seks dipandang sebagai status yang melekat atau bawaan sedangkan gender sebagai status yang diterima atau diperoleh

Dalam realitas, masih sering ditemukan kasus bias gender dalam pendidikan. Padahal ini akan berimplikasi pada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam sejumlah aspek kehidupan. Karena itu, penting terus dilakukan upaya mengatasi bias gender dalam pendidikan, di antaranya melalui; (1) reinterpretasi ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang bias gender dilakukan secara kontinyu agar ajaran agama tidak dijadikan justifikasi yang salah; (2) pengembangan kurikulum berbasis kesetaraan, keadilan dan keseimbangan; (3) pemberdayaan kaum perempuan di sektor pendidikan informal; (4) pemberdayaan di sektor ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga terutama dalam kegiatan industri rumah tangga; (5) pendidikan politik bagi perempuan agar dilakukan secara intensif; (6) pemberdayaan di sektor keterampilan, baik keterampilan untuk kebutuhan rumah tangga maupun yang memiliki nilai jual; dan (7) sosialisasi undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga lebih intens.***

Daftar Pustaka

- Amasari (Member of PSG LAIN). *Laporan Penelitian Pendidikan Berwawasan Gender*. Banjannasin: IAIN Antasari, 2005.
- Asrohah, Hanun. *Sosiologi Pendidikan*. Surabaya: Kopertais Press, 2008.
- Echol, Jhon M. dan Hasan Shadily. *Kamus Besar Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Faqih, Mansour. *Analisis gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Faqih, Mansour. *Gender Sebagai Alat Analisis Sosial*. Edisi 4 November 1996.
- Freire, Paulo *et.al*. *Menggugat Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Gonibala, Rukmina. *Fenomena Bias Gender dalam Pendidikan Islam*. artikel STAIN Manado, Juli-Desember 2007.

[Http://Www.Dikmas.Depdiknas.Go.Id/05-P-Gender-Pedoman.Html](http://www.dikmas.depdiknas.go.id/05-p-gender-pedoman.html)

Mas'udi, Masdar F. *Perempuan Dalam Wacana Keislaman*. Jakarta: Penerbit Obor, 1997.

Mufidah. *Paradigma Gender*. Malang: Bayumedia Publishing, 2003.

O'Neil, William. *Ideologi-Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Purwati, Eni dan Hanun Asrohah, *Bias Gender dalam Pendidikan Islam*, Surabaya: Alpha, 2005.

Rahardjo, Yulfita. *Konsep Gender, Kerangka Analisa Gender Berkaitan dengan Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender/ARG*, Disampaikan dalam acara Sosialisasi Penyusunan dan Penelaahan RKAKL yang Responsif Gender pada 1 Juni 2010 di Bappenas, Ruang SS 12.

Robinson, Philip. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press, 1981.

Suryadi, Ace dan Ecep Idris. *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*. cet. I. Bandung: Genesindo, 2004.

Umar, Nasarudin. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.